



## Analisa Kemampuan TNI AL di Perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina sebagai Penyangga Ibukota Negara dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara

Sobarudin<sup>1\*</sup>, Mitro Prihartoro<sup>2</sup>, Dudik Purwanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI Indonesia

<sup>2,3</sup>Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Indonesia

\*Korespondensi: [skmiurnal@gmail.com](mailto:skmiurnal@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 21  
September 2024

Disetujui 27  
Januari 2025

Dipublikasikan 12  
Februari 2025

**Keywords:**  
TNI AL;  
Perbatasan; Ibu  
Kota Negara;  
Kedaulatan  
Negara;  
Pertahanan Laut

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis kemampuan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina, yang memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru di Nusantara, Kalimantan Timur. Wilayah perbatasan ini merupakan kawasan maritim strategis dengan potensi ancaman konvensional maupun non-konvensional, seperti aktivitas ilegal, konflik perbatasan, dan ancaman militer. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pertahanan laut menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas kawasan dan mendukung kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan data primer dan skunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TNI AL telah menjalankan perannya secara efektif melalui patroli perbatasan, kerja sama internasional, dan diplomasi maritim, masih diperlukan peningkatan kemampuan TNI AL, strategi pertahanan laut khususnya Lantamal XIII Tarakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina, peningkatan kemampuan alutsista TNI AL sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi ancaman di wilayah perbatasan. Upaya tersebut akan memperkuat kemampuan TNI AL dalam menghadapi dinamika ancaman yang berkembang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina dan mendukung pertahanan nasional dalam rangka menjaga kedaulatan negara.*

### Abstract

*This study analyzes the capability of the Indonesian Navy (TNI AL) in safeguarding national sovereignty in the border areas of Indonesia-Malaysia-Philippines, which play a strategic role as a buffer for the new National Capital (IKN) in Nusantara, East Kalimantan. This border region is a strategic maritime area with potential conventional and non-conventional threats, such as illegal activities, border conflicts, and military threats. Therefore, enhancing naval defense capacity is a top priority to maintain regional stability and support national sovereignty. This research employs a qualitative method with a case study approach, based on primary and secondary data obtained through interviews, observations, and literature review. The findings reveal that although the Indonesian Navy has effectively performed its role through border patrols, international cooperation, and maritime diplomacy, there is still a need to improve TNI AL's capabilities, particularly naval defense strategies, in Lantamal XIII*

*Tarakan, which borders Malaysia and the Philippines. Strengthening TNI AL's defense equipment (alutsista) is also essential as part of the strategy to address threats in the border region. These efforts will enhance TNI AL's ability to respond to evolving threats in the Indonesia-Malaysia-Philippines border area and support national defense in safeguarding the country's sovereignty.*

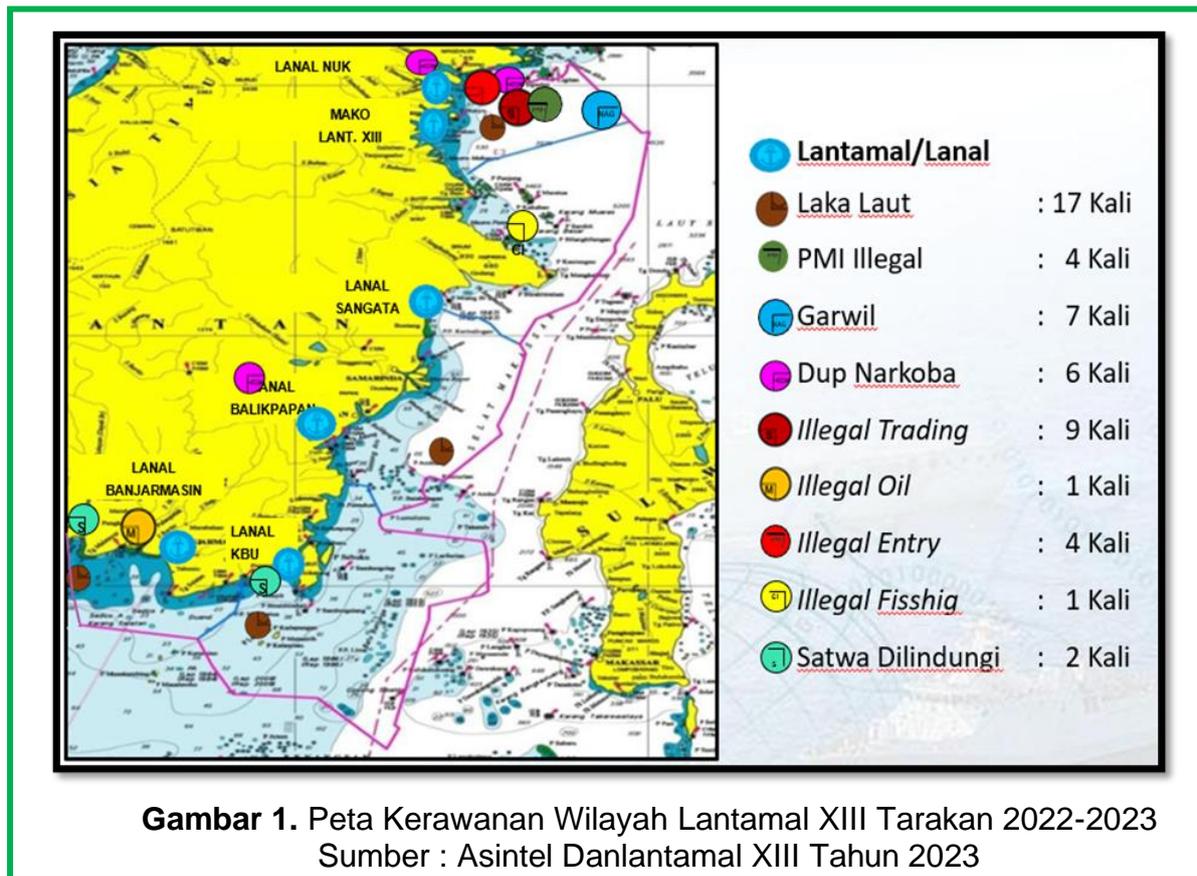
## 1. Pendahuluan

Rencana perpindahan Ibukota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur pada membawa perubahan signifikan dalam lanskap pertahanan nasional. Posisi IKN yang dikelilingi oleh perairan Selat Makassar, Laut Sulawesi menuntut penguatan pertahanan laut yang kokoh. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina menjadi salah satu kawasan maritim strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dinamika keamanan maritim di wilayah ini kian kompleks dengan berbagai aktivitas ilegal baik militer maupun non militer, sehingga pengamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi penentu utama dalam mendukung kedaulatan negara, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia, luas wilayah yurisdiksi nasional Indonesia  $\pm$  7,8 juta km<sup>2</sup> dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas  $\pm$  5,9 juta km<sup>2</sup>, panjang garis pantai  $\pm$  81.000 km, serta memiliki 17.499 pulau yang terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau tidak/belum bernama menambah kompleksitas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional khususnya pengelolaan wilayah perbatasan mencakup peningkatan kapasitas pertahanan laut.

Berbicara tentang hal terbut, Kota Tarakan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara adalah bagian dari Wilayah Indonesia di utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina. Posisi tersebut sangat strategis sebagai segitiga emas dilihat dari letak geografisnya sebagai perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. Letaknya yang di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi menjadikannya sebagai lokasi yang strategis dalam hal kerjasama keamanan lintas batas antara ketiga negara. Kerjasama antara ketiga negara meliputi berbagai aspek, mulai dari patroli bersama untuk mengatasi ancaman lintas batas hingga pertukaran informasi intelijen guna menghadapi tantangan keamanan maritim (Agus & Wawan, 2022). Selain itu, Tarakan juga memiliki nilai strategis dari segi ekonomi karena menjadi salah satu pintu gerbang perdagangan dan jalur transportasi laut yang penting di wilayah tersebut (Amelia et al., 2022). Bahkan Kota Tarakan dapat menjadi Pelabuhan Transit bagi kapal-kapal asing yang akan melakukan kegiatan perdagangan di Ibukota Negara (IKN) karena terbatasnya kemampuan dan fasilitas pelabuhan di Balikpapan dalam menampung kapal-kapal yang akan sandar.

Letak geografisnya yang strategis, Kota Tarakan juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama minyak dan gas. Perkembangan industri hulu minyak dan gas (migas) terus berkembang, mulai dari penggunaan pompa angguk oleh perusahaan minyak milik Belanda sejak tahun 1896 hingga eksplorasi dan eksploitasi migas dengan teknologi yang lebih canggih. Berdasarkan letak geografisnya yang strategis dan potensi sumber daya alam

yang sangat melimpah ini, tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan kelangsungan hidup bangsa apabila dikelola dengan baik dan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang memadai. Dengan posisi strategisnya sebagai wilayah penyangga yang produktif, kota Tarakan tidak hanya menawarkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga membawa sejumlah dampak negatif yang patut diperhatikan. Salah satu dampak tersebut adalah rentan terhadap konflik terkait pemanfaatan daya alam yang melimpah di sekitarnya dapat memicu perselisihan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam eksploitasi sumber daya alam. Terlebih posisi strategis Tarakan juga menyebabkan kerawanan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Kerawanan tersebut diilustrasikan melalui gambar dibawah ini:



Disamping kerawanan-kerawanan berupa ancaman yang bersifat konvensional, Pulau Tarakan dengan sejarahnya yang pernah menjadi lokasi pertempuran pada Perang Dunia II dan konflik internal Indonesia, memiliki potensi terjadinya ancaman yang bersifat konvensional (penggunaan kekuatan militer) serta konflik lain juga yang perlu diperhatikan. Perang Dunia II melibatkan Tarakan sebagai bagian dari strategi perang di Asia Tenggara, yang kemudian menjadi salah satu medan pertempuran sengit antara pasukan Sekutu dan Jepang pada 1945. Konflik internal Indonesia juga pernah melibatkan Tarakan, terutama dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan konflik bersenjata antara pemerintah dan pemberontak. Potensi terjadinya konflik baik dari dalam maupun luar negeri membuat pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan di Pulau Tarakan. Hal ini menuntut perhatian yang serius dalam pengembangan strategi pertahanan dan keamanan yang efektif, serta penguatan kerjasama antar instansi dan

pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan di wilayah tersebut.

TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI merupakan komponen utama pertahanan negara di laut. Tugas dan tantangan TNI AL ke depan akibat dari dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional akan semakin kompleks. Spektrum ancaman yang ditimbulkan dari era globalisasi makin bervariasi, hal ini ditandai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membawa dampak tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 9 menyebutkan tugas TNI AL adalah melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dalam konteks penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI AL dalam pertahanan laut di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina sebagai penyangga Ibukota Negara, TNI AL dituntut berperan dengan optimal sebagai bagian integral dari TNI yang bertanggung jawab atas menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di wilayah perbatasan tersebut mengingat, potensi ancaman baik yang bersifat konvensional maupun tidak konvensional perlu diantisipasi.

Berdasarkan latar belakang di atas terkait dengan kerawanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina berupa ancaman konvensional maupun konvensional dengan berbagai permasalahan yang ada, TNI AL perlu terus melakukan penyesuaian kekuatan serta meningkatkan kemampuan alutsista guna menghadapi dinamika tersebut. Sehingga dengan demikian, penguatan pertahanan laut di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina sebagai penyangga Ibukota Negara dapat mendukung kedaulatan negara Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina terkait dengan analisa kemampuan TNI AL sebagai penyangga Ibu Kota Negara dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui desain fenomenologi, penelitian ini dilakukan dengan prosedur yang mencakup penelitian pendahuluan, identifikasi, serta perumusan masalah berdasarkan fenomena yang berkembang di wilayah perbatasan (Andyva & Burhanuddin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan dinamika operasional yang dihadapi oleh TNI AL dalam menghadapi potensi ancaman keamanan, kejahatan lintas negara, serta tantangan geopolitik di kawasan tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran strategis TNI AL dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Proses pengumpulan data menjadi langkah awal yang krusial, mencakup data primer seperti wawancara dengan personel militer serta data sekunder dari laporan strategis dan kebijakan pertahanan. Setelah data terkumpul, keabsahannya harus diperiksa melalui triangulasi sumber, validasi dokumen resmi,

serta pengecekan kesesuaian dengan kondisi faktual di lapangan (Baskoro, 2021). Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif guna memahami efektivitas postur pertahanan maritim, kesiapan alutsista, serta tantangan operasional yang dihadapi di kawasan perbatasan. Hasil analisis kemudian dideskripsikan secara sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi penguatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman keamanan laut. Dari keseluruhan proses ini, penelitian dapat menyimpulkan sejauh mana kapabilitas TNI AL mampu berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan pertahanan maritim di wilayah perbatasan.

Analisis data penelitian dilaksanakan di jajaran Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) guna mengkaji secara mendalam tetapi tetap dalam konteks alamiah dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari para aktor (key informan) yang terlibat dalam dinamika operasional TNI AL, khususnya dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data model Huberman yang menekankan pada tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Melalui pendekatan ini, kemampuan TNI AL di perbatasan dapat dievaluasi secara lebih sistematis, mencakup aspek kesiapan tempur, patroli maritim, serta strategi pengamanan laut guna mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas dan kedaulatan nasional.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil**

##### **Dinamika Ancaman di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina**

Laut Sulu yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, menjadi kawasan yang rawan kejahatan. Sejak Maret 2016, terjadi serangkaian peristiwa pembajakan dan perompakan yang disertai penculikan dengan permintaan uang tebusan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dan ISIS Asia Tenggara yang berbasis di Filipina Selatan. Sasaran kejahatan itu adalah kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Laut Sulu. Kondisi ini menjadikan Laut Sulu termasuk perairan paling berbahaya di dunia.

Wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Filipina merupakan area strategis yang menghadapi berbagai dinamika ancaman. Ancaman ini meliputi penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, penangkapan ikan ilegal, serta peredaran barang ilegal. Kondisi geografis yang kompleks, termasuk banyaknya pulau dan perairan yang sulit dijangkau, membuat penegakan hukum dan pengawasan di wilayah ini menjadi tantangan. Salah satu ancaman yang signifikan adalah penyelundupan narkoba. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi penyelundup narkoba, terutama dari Malaysia dan Filipina. Penangkapan besar-besaran terhadap penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Sebagai contoh, pada Maret 2023, aparat keamanan berhasil menggagalkan penyelundupan 21 kg meth dari Malaysia ke Indonesia di Nunukan, Sebatik, dengan melibatkan 11 tersangka.

Perdagangan manusia dan penyelundupan migran juga menjadi masalah utama. Banyak migran ilegal yang mencoba menyeberangi perbatasan laut menuju Malaysia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Henry, 2022). Perompakan dan kejahatan maritim lainnya juga kerap terjadi, menciptakan ketidakamanan bagi nelayan dan kapal yang beroperasi di perairan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus perompakan dan penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak telah meningkat, yang mencerminkan kurangnya pengawasan di perairan ini (Muhammad & Arfin, 2022). Kecelakaan maritim, seperti tenggelamnya kapal akibat cuaca buruk, juga menjadi ancaman, mengingatkannya aktivitas perikanan dan transportasi di wilayah ini.

Berdasarkan rilis data dan peta kerawanan wilayah kerja Lantamal XIII Tarakan untuk periode 2022–2023, terlihat bahwa berbagai insiden yang terjadi menggambarkan kompleksitas ancaman yang terus berkembang di kawasan tersebut. Dengan wilayah perbatasan yang luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, kawasan ini menjadi area strategis bagi berbagai aktivitas ilegal serta kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, hingga pergerakan kelompok bersenjata.

### **Tantangan dan Hambatan yang dihadapi TNI AL dalam penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina**

Wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Filipina mencakup area yang sangat luas. Wilayah ini termasuk Laut Sulawesi dan Laut Sulu yang memiliki banyak pulau kecil, jalur pelayaran terbuka, banyak pintu masuk di wilayah perbatasan dan bersinggungan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan kepedulian bersama, khususnya bagi TNI AL sebagai komponen utama pertahanan di laut yang memiliki peran vital dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan tersebut (Prima, 2019). Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi TNI AL di wilayah perbatasan ini, kekuatan TNI AL di wilayah ini harus memiliki kemampuan manuver dan kecepatan yang tinggi, mampu mendukung tim reaksi cepat serta diawaki oleh personel yang profesional dan tangguh. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung memperumit upaya TNI AL untuk merespons ancaman dengan cepat dan efektif. Untuk menghadapi situasi ini, TNI AL harus memperkuat strategi kerjasama dengan negara-negara tetangga melalui peningkatan patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen secara real-time (Wiswayana, 2023). Selain itu, modernisasi alutsista dengan mengintegrasikan teknologi terkini seperti drone pengawasan dan sistem radar canggih sangat penting (Syarif, 2020). Peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan intensif dan simulasi operasi di lapangan akan memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario.

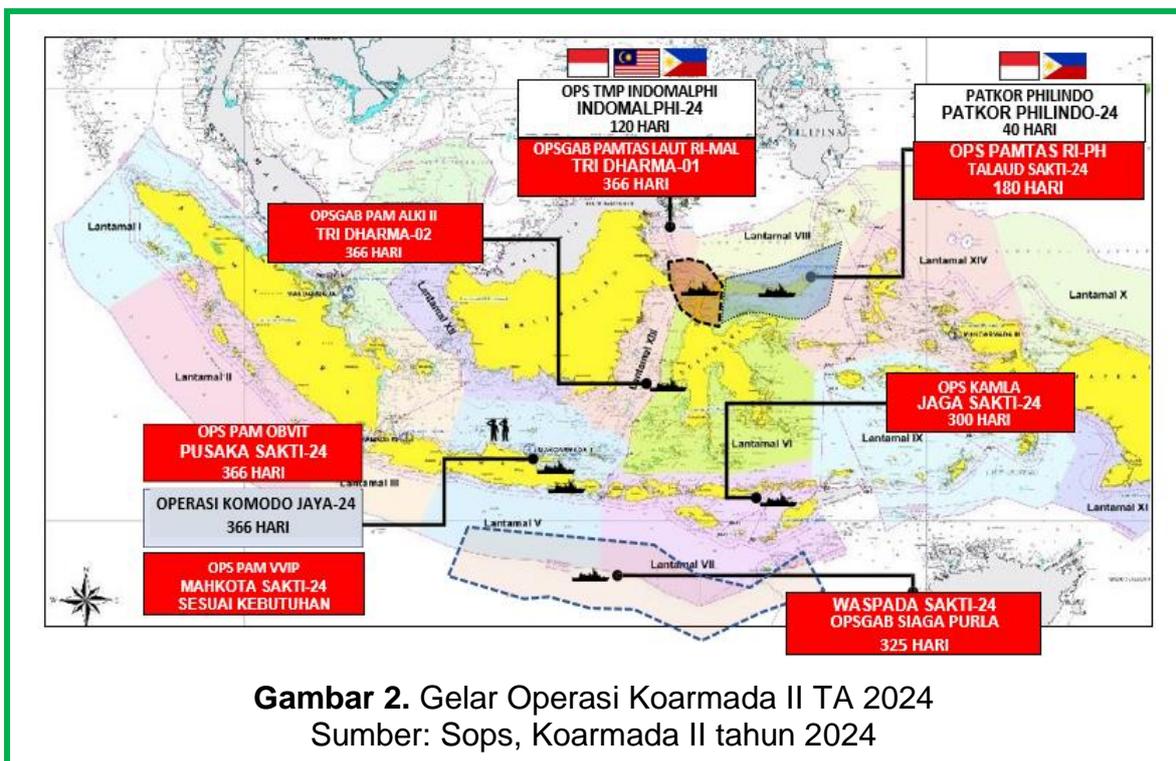
Pertimbangan Strategis Pertahanan Laut dalam Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara IKN. Letak geografis Ibu Kota Nusantara yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak) sepanjang 2.062 km, serta kedekatannya dengan beberapa zona maritim strategis membawa tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian khusus. Di sebelah timur, ibu kota baru ini berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), sebuah chokepoint penting yang meliputi Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Selat Lombok, yang menjadi jalur utama pelayaran internasional, termasuk pergerakan armada kapal perang dari berbagai negara. Kedekatan dengan Laut China Selatan yang diklaim

oleh China dengan kekuatan militernya di Kepulauan Spratly dan Paracel memperkuat kebutuhan akan langkah-langkah pertahanan yang ketat.

Pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara membutuhkan perencanaan dan sumber daya yang signifikan. TNI Angkatan Laut (TNI AL) dengan Koarmada II sebagai Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) memegang peran krusial dalam menjaga kedaulatan negara terutama di wilayah maritim yang strategis ini. Koarmada II sebagai pusat komando memastikan koordinasi yang efektif dalam mengawasi operasi di seluruh wilayah tengah dan timur Indonesia termasuk perairan sekitar Ibu Kota Nusantara dengan dukungan teknologi canggih seperti Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) sehingga memungkinkan pemantauan dan perlindungan terhadap perairan di sekitar Ibu Kota Nusantara. Infrastruktur pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat segera diidentifikasi dan ditangani sehingga ibu kota baru terlindungi dari berbagai tantangan keamanan. Dengan demikian pemindahan strategis Ibu Kota Negara ke Nusantara, selain memberikan peluang ekonomi dan pembangunan juga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam hal pertahanan dan keamanan.

### **Pola Gelar kekuatan TNI AL di Wilayah Perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Filipina**

Tahun 2024, gelar operasi Koarmada II di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina melibatkan pengerahan armada dan personel yang ditempatkan di titik-titik strategis untuk memantau dan menindak setiap aktivitas ilegal di perairan tersebut. Operasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap aman dan terlindungi dari ancaman eksternal, serta untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Adapun gelar operasi Koarmada II di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina tahun 2024 tervisualisasi dalam gambar berikut:



**Gambar 2.** Gelar Operasi Koarmada II TA 2024

Sumber: Sops, Koarmada II tahun 2024

Penempatan kapal-kapal ini harus didukung oleh kehadiran alut sista yang modern dan pengawaknya yang profesional yang siap bergerak untuk menanggapi ancaman secara cepat dalam bingkai West Fleet Quick Response (WFQR). Dengan meningkatkan kemampuan operasional armada laut, TNI AL dapat lebih efektif dalam melakukan patroli dan pengawasan di perairan yang rawan, seperti Selat Makassar dan Laut Sulawesi, yang berdekatan dengan jalur perbatasan dengan Malaysia dan Filipina.

TNI AL perlu menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yang canggih untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan wilayah maritim. Penggunaan teknologi seperti drone dan satelit untuk pemantauan dapat membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal di perairan tersebut. Dengan mengintegrasikan sistem Command and Control yang modern, TNI AL dapat mempercepat respons terhadap potensi ancaman, serta mengkoordinasikan operasi dengan instansi lain, termasuk Polri dan badan intelijen.

### **Peran dan kemampuan Lantamal XIII Tarakan sebagai pertahanan penyangga Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur**

Pangkalan TNI AL memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan strategi pertahanan laut. Pangkalan ini memiliki beberapa fungsi utama yang menjadi tugas pokoknya, yaitu memberikan dukungan administrasi dan logistik bagi satuan operasional TNI AL, menjaga keamanan laut (penegakan hukum), dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) (Rahmat & Rusdiyanta, 2021). Peran Lantamal XIII Tarakan dalam pertahanan negara di laut didayagunakan dalam bentuk dukungan dan fasilitas terhadap satuan operasional TNI AL, sedangkan Peran Lantamal XIII dalam penegakan hukum di laut didayagunakan untuk kegiatan penindakan kejahatan dan pelanggaran hukum di laut, serta Peran Lantamal XIII dalam Dawilhanla melalui Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) untuk menggali potensi-potensi maritim di wilayah dalam bela negara maupun sebagai kekuatan nasional. Selain beberapa peran di atas, Lantamal XIII juga berperan dalam membantu penanggulangan bencana alam sebagai bagian tugas dari TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bantuan pencarian dan pertolongan di laut serta perbantuan kepada pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur maritim yang dapat memperkuat pertahanan dan keamanan di kawasan tersebut.

Kekuatan Lantamal XIII Tarakan terletak pada alutsista yang dimiliki, berupa KRI, Kal/Patkamla, Rhib Trimaran, Sea Rider serta speed boat dan perahu karet. Unsur-unsur tersebut dibawah pembinaan Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal XIII, meliputi KRI SDT-851, KRI PRI-849, Kal Bunyu, Kal Simaya (rusak), Patkamla Mamburungan, Patkamla Sebatik, Patkamla Sekatak, RHIB Trimaran, 2 Sea Rider serta speed boat dan sekoci karet. Sedangkan kemampuan Lantamal XIII adalah berupa kemampuan dukungan melalui fungsi 5R Pangkalan TNI AL, kemampuan melaksanakan operasi keamanan laut terbatas dan laut pedalaman serta kemampuan melaksanakan pencarian dan pertolongan di laut (SAR). Kekuatan dan kemampuan Lantamal XIII masih jauh dari kata cukup, Lantamal XIII belum memiliki kemampuan pertahanan pangkalan yang ideal, belum memiliki kemampuan pendeteksian (surveillance), belum memiliki fasilitas sandar yang ideal dan belum memiliki Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) tipe A. Dengan adanya fasilitas pelabuhan yang memadai, diharapkan Lantamal XIII mampu mendukung berbagai operasi militer, baik dalam bentuk operasi mandiri

Angkatan Laut, Latihan bersama dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat, serta operasi penanggulangan terorisme di wilayah maritim. Kemampuan intelijen juga menjadi salah satu aset penting Lantamal XII, yang memungkinkannya untuk memantau dan menganalisis situasi keamanan di perairan sekitar IKN.

### **3.2 Pembahasan**

#### **Implementasi kemampuan TNI AL di wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Filipina**

Implementasi kemampuan TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina dimulai dengan penilaian terhadap kompleksitas ancaman yang dihadapi serta dinamika perkembangan lingkungan strategis (Prabowo, 2022). Proses ini untuk memahami berbagai tantangan yang muncul, baik dari segi militer, politik, maupun sosial. Dengan menggunakan Teori Kemampuan, TNI AL dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan yang dimiliki, serta potensi yang perlu dikembangkan untuk menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Kemampuan umum yang mendasari berbagai keterampilan spesifik dapat diidentifikasi melalui adaptasi, integrasi, dan respons terhadap situasi kompleks di wilayah perbatasan. Dalam konteks TNI AL, hal ini mencakup pemahaman terhadap lingkungan strategis yang meliputi aspek politik, sosial, dan ekonomi yang berdampak pada keamanan nasional. Penguasaan keterampilan teknis dalam penggunaan alutsista perlu dipadukan dengan kemampuan analitis yang baik untuk menilai beragam ancaman. Selain itu, efektivitas TNI AL juga bergantung pada kemampuannya bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna membangun sistem pertahanan yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan kemampuan ini, TNI AL dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam menghadapi berbagai tantangan.

Implementasi kemampuan TNI Angkatan Laut (AL) dalam menjaga stabilitas keamanan di perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina sangat penting, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak jalur laut yang vital. TNI AL bertugas sebagai penjaga kedaulatan di laut dan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan serta kestabilan di wilayah tersebut. TNI AL memiliki tiga peran utama, yaitu Peran Militer, Peran Polisionil, dan Peran Diplomasi. Dalam bukunya *Navies and Foreign Policy*, Ken Booth juga menjelaskan bahwa angkatan laut di seluruh dunia secara umum menjalankan tiga peran yang disebut sebagai Trinitas Angkatan Laut. Tiga peran ini mencakup peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*), dan peran diplomasi (*diplomacy role*).

Teori *Sea Power* yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *"The Influence of Sea Power Upon History 1660-1753"* juga menjadi landasan yang dirujuk dalam pendekatan strategis TNI AL. Mahan menekankan bahwa kekuatan maritim adalah kunci untuk menguasai jalur perdagangan dan mempertahankan kedaulatan negara. Dalam hal ini, TNI AL memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang strategis, dengan lautan sebagai sarana untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Dengan memahami bahwa dominasi maritim dapat mengamankan jalur perdagangan dan memperkuat pengaruh politik, TNI AL menerapkan prinsip-prinsip Mahan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang berfokus pada pengembangan kekuatan laut yang tangguh. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan armada, pengembangan

infrastruktur maritim, dan penguatan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, upaya strategis TNI Angkatan Laut dalam gelar kekuatan, seperti yang tertuang dalam Gelar Operasi Koarmada II TA. 2024, dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan alutsista yang ada serta menyesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

### **Strategi Lantamal XIII Tarakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina dalam menghadapi dinamika ancaman guna menjaga kedaulatan negara**

Lantamal XIII Tarakan, sebagai pangkalan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, berperan strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Penggunaan konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) menjadi rujukan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk melindungi perairan di kawasan perbatasan. SPLN bertujuan untuk melindungi kedaulatan wilayah maritim dan mengelola sumber daya secara optimal dalam menghadapi dinamika ancaman yang berubah-ubah.

Tiga pilar utama SPLN yaitu pertahanan berlapis, pergeseran medan juang, dan pertahanan semesta memberikan kerangka kerja untuk melindungi kedaulatan negara di perairan strategis. Pertahanan berlapis menuntut penerapan kekuatan gabungan antara angkatan laut dan angkatan udara, menciptakan lapisan-lapisan pertahanan yang saling mendukung dan menguatkan. Di tengah meningkatnya potensi konflik, strategi penangkalan proaktif menjadi dilaksanakan untuk mencegah gangguan terhadap kedaulatan negara. Kehadiran aktif TNI AL di perairan dengan eskalasi ancaman tinggi memungkinkan pengawasan dan pengendalian situasi secara efektif, menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman. Dalam kondisi damai, fokus SPLN adalah membangun kondisi perairan yang terkendali, sehingga Lantamal XIII dapat mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan penangkalan dan pengendalian laut, Lantamal XIII berfungsi sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kepentingan nasional. Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan TNI AL untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat dengan instansi terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional, menjadi sangat penting. Sinergi ini akan memperkuat daya tangkal dan daya dukung Lantamal XIII dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, memastikan bahwa semua aspek pertahanan laut berjalan secara efektif.

Konteks Teori Trinitas Angkatan Laut yang dikemukakan oleh Ken Booth (1977), Lantamal XIII menjalankan tiga peran penting. Pertama, peran militer (military/defense) berfokus pada penegakan kedaulatan negara di laut melalui pertahanan dan penangkalan terhadap ancaman dari negara lain. Kedua, peran polisionil (constabulary) bertujuan menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya laut, serta menjaga ketertiban dari tindak pidana. Ketiga, peran diplomasi (diplomacy supporting) memanfaatkan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, Lantamal XIII tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam stabilitas regional dan diplomasi internasional, memastikan bahwa kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia tetap terjaga.

Strategi Pertahanan Laut Lantamal XIII dilaksanakan melalui Gelar Pangkalan TNI AL yaitu gelar kekuatan diarahkan di daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik. Dalam hal ini Wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina, memerlukan peningkatan kemampuan Pangkalan TNI AL untuk menciptakan keamanan perbatasan, sehingga Pangkalan TNI AL Tarakan yang berdiri sejak tahun 1968 telah diubah statusnya menjadi Pangkalan Utama TNI AL XIII berdasarkan peraturan Panglima TNI No. 12 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XIII Pontianak, Lantamal XIII Tarakan, Lantamal XIV Sorong, dan selanjutnya di perkuat dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut No.4 Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI AL Kelas B Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI AL XIII Tarakan dan diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E, M.A.P pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan Komandan Lantamal pertama Laksamana Pertama TNI Wahyudi H Dwiyono.

Strategi pertahanan laut Lantamal XIII Tarakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang kompleks dan multidimensi. Mengingat posisi strategisnya, Lantamal XIII Tarakan harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mampu menghadapi berbagai ancaman potensial baik dari aspek keamanan tradisional maupun non-tradisional. Berikut ini adalah pengembangan dari beberapa strategi yang diterapkan:

**Tabel 1.** Pengembangan dari beberapa strategi

No	Aspek	Deskripsi
1	Pengawasan dan Patroli	Lantamal XIII Tarakan menggunakan teknologi canggih untuk pengawasan maritim, termasuk radar pantai, sistem pemantauan satelit, dan drone pengintai. Kapal patroli dilengkapi dengan komunikasi dan navigasi modern serta persenjataan. Pengawasan juga dilakukan oleh pesawat udara maritim untuk jangkauan lebih luas.
2	Kerjasama Trilateral	Lantamal XIII Tarakan aktif dalam kerja sama keamanan dengan Malaysia dan Filipina melalui Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) Indomalphi. Program meliputi Trilateral Marine Patrol (TMP), Trilateral Air Patrol (TAP), berbagi informasi intelijen, serta pertemuan dan port visit.
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur	Program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat pesisir untuk pengelolaan sumber daya laut dan keterampilan maritim. Infrastruktur maritim, seperti pelabuhan, dermaga, dan fasilitas logistik, ditingkatkan untuk mendukung operasi angkatan laut dan ekonomi.
4	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Prajurit	Lantamal XIII Tarakan mengelola personel berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP). Kegiatan pendidikan, kursus, dan latihan, termasuk Latihan Operasi Matra Laut (Latopsmatla), dilakukan secara berjenjang untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme prajurit.
5	Penanggulangan Ancaman Non-Tradisional	Mengatasi perubahan iklim, polusi laut, dan penangkapan ikan ilegal. Langkah mitigasi termasuk menghadapi badai dan kenaikan permukaan laut serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perikanan ilegal.
6	Tantangan dan	Mengelola perairan luas dengan anggaran terbatas melalui

---

Upaya Mengatasinya otomatisasi teknologi dan sistem pemantauan yang efisien. Aliansi dengan sektor swasta dan NGO dilakukan untuk dukungan sumber daya. Pendekatan adaptif diperlukan menghadapi ancaman yang terus berkembang.

---

Strategi pertahanan laut Lantamal XIII Tarakan melibatkan kombinasi pengawasan teknologi canggih, kerjasama internasional yang kuat, pemberdayaan masyarakat, pelatihan personel yang berkelanjutan, serta mitigasi ancaman non-tradisional. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan Indonesia tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Melalui upaya ini, Lantamal XIII Tarakan berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah maritim Indonesia.

### **Peningkatan kemampuan alutsista dan fasilitas pangkalan Lantamal XIII Tarakan sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi dinamika ancaman di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina**

Peningkatan kemampuan alutsista dan fasilitas di Lantamal XIII Tarakan merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi dinamika ancaman di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. Dalam konteks ini, teori optimalisasi digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya. Optimalisasi berarti mencari solusi terbaik untuk memaksimalkan teknologi militer dan infrastruktur, sehingga Lantamal XIII dapat berfungsi secara maksimal dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Ini meliputi perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan situasi di lapangan.

Selanjutnya sejalan dengan teori Sea Power dari Alfred Thayer Mahan yang berbicara dominasi laut untuk menjaga kedaulatan negara. Mahan berpendapat bahwa menguasai jalur laut strategis adalah kunci untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh. Dengan penguatan kemampuan operasional TNI AL di perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina, Lantamal XIII dapat melindungi sumber daya alam dan keamanan pelayaran, serta mencegah ancaman, sehingga berfungsi sebagai penyangga efektif dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, peningkatan alutsista dan fasilitas Lantamal XIII sejalan dengan prinsip optimalisasi dan teori Sea Power, mendukung strategi pertahanan maritim yang komprehensif dan responsif.

Kemampuan alutsista TNI AL di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina merupakan komponen dalam strategi pertahanan laut. Wilayah ini memiliki posisi strategis yang vital bagi keamanan dan stabilitas regional, serta rentan terhadap berbagai ancaman maritim. Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect). Namun demikian, "pameran bendera" atau show of flag seperti di atas tidak saja harus diartikan sebagai sebuah tindakan coercive tetapi merupakan sebuah naval diplomacy yang merupakan cerminan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Kegiatan ini juga diarahkan guna mengetahui Kemampuan Alutsista TNI AL di wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia-Filipina sebagai bagian dari strategi pertahanan Laut dengan menggelar Alpal sebagai Komponen Utama Alutsista TNI AL sebagai berikut:

**Tabel 2.** Komponen Utama Alutsista TNI

No	Kategori	Deskripsi
1	Kapal Perang	Kapal perang TNI AL seperti KRI (Kapal Republik Indonesia) dilengkapi dengan Sewaco (sensor weapon control and command) modern untuk menjalankan operasi maritim.
2	Kapal Cepat Rudal (KCR)	Memiliki kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan rudal anti-kapal C-705 serta meriam otomatis. Kapal ini efektif untuk patroli dan intersepsi cepat terhadap ancaman maritim.
3	Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) Sigma-class	Kapal kombatan besar dengan kemampuan tempur komprehensif, dilengkapi dengan rudal anti-kapal Harpoon, rudal pertahanan udara VL MICA, serta sistem sonar dan torpedo untuk operasi anti-kapal selam.
4	Pesawat Patroli Maritim	Pesawat patroli maritim memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengintaian maritim.
5	Helikopter Anti-Kapal Selam	Helikopter AS565 Panther digunakan untuk operasi anti-kapal selam, dilengkapi dengan torpedo dan sonar. Juga mampu melakukan pencarian dan penyelamatan (SAR) serta evakuasi medis.
6	Sistem Senjata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rudal Anti-Kapal – Seperti Exocet dan C-802, dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan musuh dengan jangkauan jauh dan kecepatan tinggi.</li> <li>2. Meriam Otomatis – Seperti Bofors 40mm dan Oto Melara 76mm, digunakan untuk pertahanan udara dan permukaan dengan kecepatan tembak tinggi.</li> <li>3. Sistem Pertahanan Udara – Rudal pertahanan udara jarak pendek untuk melindungi kapal dari serangan udara dan rudal musuh.</li> </ol>

Alutsista TNI AL berperan dalam operasi pengawasan rutin untuk mencegah dan menangkal kegiatan ilegal seperti penyelundupan, pembajakan, dan penangkapan ikan ilegal. Kapal patroli dan pesawat pengintai digunakan untuk memantau pergerakan di wilayah perairan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan maritim. Operasi seperti Operasi Trisula dan Operasi Cakra secara rutin dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan strategis. Kekuatan tempur alutsista TNI AL, termasuk kapal fregat, korvet, dan kapal cepat rudal, disiapkan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain. Keberadaan alutsista ini berfungsi sebagai deterrence (penangkal) terhadap potensi agresi, menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia di kawasan yang strategis ini. Latihan militer seperti Latihan Gabungan Armada Jaya melibatkan simulasi skenario pertempuran untuk meningkatkan kesiapan tempur. Kerjasama dengan angkatan laut negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina juga ditingkatkan melalui latihan militer bersama dan patroli terkoordinasi. Alutsista yang modern dan interoperable memudahkan kerjasama ini, meningkatkan efektivitas dalam menangani ancaman bersama di wilayah perbatasan. Contoh kerjasama ini adalah Malacca Straits Patrol yang melibatkan patroli bersama untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman maritim.

Kemampuan alutsista TNI AL di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina memainkan berperan strategis dalam strategi pertahanan laut Indonesia.

Dengan kombinasi kapal perang, pesawat patroli, helikopter, dan sistem senjata yang canggih, TNI AL siap menghadapi berbagai ancaman maritim dan memastikan keamanan serta kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya peningkatan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kemampuan alutsista yang optimal. Selanjutnya peningkatan fasilitas pangkalan, seperti infrastruktur pemeliharaan alutsista dan logistik, menjadi faktor penunjang dalam memastikan kesiapan operasional TNI AL. Fasilitas pemeliharaan yang baik tidak hanya memperpanjang umur alutsista, tetapi juga meningkatkan keandalan dalam operasional sehari-hari. Pengembangan ini juga mencakup peningkatan fasilitas pelatihan bagi personel, sehingga mereka dapat mengoperasikan dan memelihara peralatan dengan lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan moral dan profesionalisme prajurit.

Aspek militer, pengembangan Lantamal XIII Tarakan juga menciptakan sinergi dengan masyarakat lokal. Dengan meningkatkan kesejahteraan personel dan membangun hubungan yang baik dengan komunitas, TNI AL dapat mengoptimalkan dukungan dari masyarakat dalam berbagai kegiatan, mulai dari patroli hingga pencarian dan penyelamatan. Ini juga membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan wilayah mereka. Penguatan alutsista dan fasilitas di Lantamal XIII Tarakan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesiapan militer, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi komprehensif dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Dengan menghadapi ancaman secara proaktif dan meningkatkan kapabilitas maritim, Lantamal XIII akan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keamanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi keamanan nasional di kawasan perbatasan.

#### **4. Kesimpulan**

TNI AL mengimplementasikan strategi pertahanan maritim untuk menjaga stabilitas keamanan di perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. Dengan mengadopsi Teori Kemampuan dan Teori Sea Power Alfred Thayer Mahan, TNI AL merumuskan strategi gelar kekuatan melalui operasi militer terencana. Strategi ini mencakup penetapan mandala operasi laut, armada siaga, serta taktik inovatif seperti kelompok kapal selam dan strategi peranjauan. Peperangan kepulauan memberikan keunggulan taktis dalam menghadapi ancaman invasi, agresi, dan infiltrasi. Pengendalian jalur pantai serta koordinasi maritim dan darat mengoptimalkan pengawasan dan respons terhadap ancaman, memperkuat pertahanan maritim serta kedaulatan negara.

Lantamal XIII Tarakan mengadopsi strategi multidimensi dalam menjaga kedaulatan di perbatasan Malaysia-Filipina. Dengan pendekatan hard power dan soft power dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN), fokus utama meliputi patroli berbasis teknologi, kerjasama bilateral-multilateral, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Pelatihan intensif dan mitigasi ancaman non-tradisional semakin memperkuat keamanan maritim. Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan ancaman kompleks, Lantamal XIII terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis. Strategi adaptif ini menjadikan Lantamal XIII garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan integritas wilayah maritim Indonesia.

Peningkatan alutsista dan fasilitas di Lantamal XIII Tarakan menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman di perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina.

Dengan pendekatan optimalisasi sumber daya, TNI AL memaksimalkan teknologi militer dan infrastruktur untuk menjaga kedaulatan negara. Fokus utama mencakup peningkatan kapabilitas alutsista berkecepatan tinggi, modernisasi fasilitas pangkalan, serta penguatan pusat komando C4ISR. Mengacu pada prinsip Sea Power Alfred Thayer Mahan, dominasi laut menjadi kunci keamanan nasional. Melalui patroli maritim dan kerja sama internasional, Lantamal XIII memperkuat stabilitas regional, memastikan kesiapan operasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim berdaulat.

### Daftar Pustaka

- Agus Fitriyanto dan Wawan Budi Darmawan. (2022) Kerjasama Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Studi Kasus Sinergi Bakamla, TNI AL dan Polairud). *Jurnal Paradigma Polistaat Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 5 No 1.
- Amelia Fatimah, Slsabila Naura dan Aries Sudiro. (2022). Maritime Surveillance System untuk Mendukung Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022*
- Andyva, M. A., & Burhanuddin, A. (2018). Eksistensi dan Implikasi RECAAP Terhadap Penguatan Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 56-74.
- Baskoro, A. (2021). Inovasi Teknologi dalam Pertahanan Maritim. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 6(2), 30-45.
- Henry, M, Manik. (2022) Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara. *Jurnal Universitas IPB*, Vol.4 No.4.
- Kandouw, K. S. O. (2019). Kajian Yuridis Perdagangan Perbatasan Indonesia Dengan Philipina. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Masya, Z. Y. (2018). *Analisis kerja sama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi Periode 2016-2017* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Muhammad Harry Riana Nugraha & Arfin Sudirman. (2022) "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1. No.2.
- Prabowo, A. (2022). *Strategi Pertahanan Laut di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina*. Jakarta: Pustaka Militer.h 45.
- Pratiwi, D. K. (2020). Keamananan Laut Wilayah Perbatasan Indonesia Sebagai Bentuk Penjagaan Kedaulatan Negara. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 2(2), 129-154.
- Prima Tegar Anugerah. (2019) "Kebijakan Dan Strategi Keamanan Maritim", *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.1. No.1.
- Rahmat, F., & Rusdiyanta, R. (2021). Hambatan Indomalphi dalam Menghadapi Ancaman Kelompok Abu Sayyaf Pada Tahun 2016-2020. *Balcony*, 5(1), 77-84.
- Sari, A. R. (2023). Peran Lantamal XII Tarakan dalam Pertahanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan Maritim*, 15(2), 45-60.

- Sirmareza, T. (2017). Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(1).
- Spearman, C. (1904). General intelligence, objectively determined and measured. *American Journal of Psychology*, 15(2), 201-292.
- Suharyo, O. S., & Bastari, A. (2021). Review strategis upaya pengamanan laut nasional menuju keamanan maritim dan pengelolaan ruang laut Indonesia. *Rekayasa*, 14(3), 443-449.
- Susanto, E. (2021). Strategi Pertahanan Maritim di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 109-130
- Syaiful Hasan dan Heran. (2020). Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Sosio Dialektika 8 P-ISSN:2540.8941 e-ISSN:2623.2944*.
- Syarif, R. (2020). Strategi Pertahanan Laut Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 15(1), 12-25.
- TNI AL. (2023). Rencana Strategis TNI Angkatan Laut 2023-2027. Jakarta: TNI Angkatan Laut.
- Wiswayana, W. M. (2023). Kerja Sama Trilateral Indonesia-Malaysia Filipina di Perairan Sulu sebagai Alternatif Kerja Sama Keamanan Kawasan Maritim. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1), 181-202.